

RENCANA KERJA (RENJA)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kami Panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (renja) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun ini merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang diuraikan secara akuntabel dan transparan.

Rencana Kerja (Renja) ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran tahun 2023.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Renja di masa yang akan datang.

Daftar Isi

KATA P	EN	GANTAR	(i)
DAFTAR	RIS	Ι	(ii)
BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	2
		1.3 Maksud dan Tujuan	4
		1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	:	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	
		TAHUN LALU	6
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan	
		capaian Renstra Perangkat Daerah	6
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
		2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	
		Daerah	42
		2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	44
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN	65
		3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	65
		3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	66
		3.3 Program dan kegiatan	66
D. D. ***		DENGLAL WEDZI DIWARNENINI	65
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	67
		4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	67
DAD W	-	DENITITID	01

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2023 dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Kerja dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang berada di kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan dan peran strategis. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan dengan memperhatikan kepentingan pelayanan anggota DPRD dan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- Permendagri No. 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana PembanguananJangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
 Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
 Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota

- Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);
- 18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17);
- Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 Tentang kedudukan, struktur organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 13);
- 21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk:

- Memberikan pedoman dan arah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun kedepan.
- b) Dasar untuk memotivasi kerja dan menyamakan persepsi serta pemahaman terhadap tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- c) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdalam rangka mendukung pencapaian visi dan Misi Walikota Pontianak sebagai dasar penyusunan laporan kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Walikota.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

- Untuk melihat sejauh mana peranan penting keberadaan serta posisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Memberikan Konstribusi dalam penataan Administrasi Kesekretariatan DPRD dalam melaksanakan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Dearah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2022. Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD Kota Pontianak melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 53.268.145.835,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut diselesaikan per Desember dengan realisasi anggaran Rp. 50.334.633.039,00 (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 80,54%.

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2021 dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Indikator kinerjanya adalah Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Meliputi Kegiatan :

a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Indikator kinerjanya adalah Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi. Untuk kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan sebagai berikut :

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah dengan capaian kinerja 100% (target 1 dokumen = realisasi 1 dokumen) berupa dokumen Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.234.815,-terserap sebesar Rp. 2.233.500,- atau sebesar 99,94 %

Pembahasan Rancangan Peraturan daerah

Indikator kinerjanya adalah Jumlah rancangan perda yang dibahas dengan capaian kinerja yang melebihi target sebesar 170 % dimana ditargetkan 10 raperda dan terealisasi 17 raperda, hal ini disebabkan banyaknya pengajuan dari eksekutif dengan anggaran sebesar Rp. 20.621.725,- terserap sebesar Rp. 20.592.893,- atau sebesar 99,86 %

Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator kinerjanya adalah Jumlah rancangan perda yang dikaji dengan capaian kinerja 100% (target 3 raperda = realisasi 3 raperda) dengan anggaran sebesar Rp. 82.014.000,- terserap sebesar Rp. 72.294.000,- atau sebesar 88,15 %

Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan /atau Naskah Akademik

Indikator kinerjanya adalah Jumlah naskah akademik yang disusun dengan capaian kinerja 100% (target 3 dokumen = realisasi 3 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 310.560.710,-terserap sebesar Rp. 305.820.580,- atau sebesar 98,47%

Penyusunan Tata Tertib DPRD

Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang dievaluasi dengan capaian kinerja 100% (target 1 dokumen = realisasi 1 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 5.644.623,-terserap sebesar Rp. 5.644.623,- atau sebesar 100 %

b) Pembahasan Kebijakan Anggaran

Indikator Kinerjanya adalah Jumlah dokumen kebijakan anggaran. Untuk kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan sebagai berikut:

Pembahasan KUA dan PPAS

Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen KUA dan PPAS dengan capaian kinerja 100% (target 1 dokumen = realisasi 1 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 3.338.500,- terserap sebesar Rp. 3.338.500,- atau sebesar 100 %

Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS

Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan capaian kinerja 100% (target 1 dokumen = realisasi 1 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 3.338.500,- atau sebesar Rp. 3.338.500,- atau sebesar 100%

Pembahasan APBD

Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen APBD dengan capaian kinerja 100% (target 1 dokumen = realisasi 1 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 4.110.000,- terserap sebesar Rp. 2.310.000,- atau sebesar 56,20 %.

Pembahasan APBD Perubahan

Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen APBD Perubahan dengan capaian kinerja 100% (target 1 dokumen = realisasi 1 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 3.338.500,- terserap sebesar Rp. 3.338.500,- atau sebesar 100 %

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD dengan capaian kinerja 100% (target 1 dokumen = realisasi 1 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 3.338.500,- terserap sebesar Rp. 3.338.500,- atau sebesar 100 %

c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerjanya adalah Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi. Untuk kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator kinerjanya adalah Jumlah rapat komisi I dengan capaian kinerja 186% (target 60 kali = realisasi 112 kali, hal ini disebabkan beberapa agenda diselesaikan dengan beberapa kali rapat sehingga jumlah rapat yang dilaksanakan jauh melebihi target) dengan anggaran sebesar Rp. 10.710.000,- terserap sebesar Rp. 8.610.000,- atau sebesar 80,39 %
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator kinerjanya adalah Jumlah rapat komisi II dengan capaian kinerja 86,66% (target 60 kali = realisasi 52 kali, hal ini disebabkan kurangnya agenda rapat yang dijadwalkan komisi) dengan anggaran sebesar Rp. 10.710.000,- terserap sebesar Rp. 7.710.000,- atau sebesar 71,99 %
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator kinerjanya adalah Jumlah rapat komisi IV dengan capaian kinerja 175% (target 60 kali = realisasi 105 kali, hal ini disebabkan beberapa agenda diselesaikan dengan beberapa kali rapat sehingga jumlah rapat yang dilaksanakan jauh melebihi target) dengan anggaran sebesar Rp. 10.710.000,- terserap sebesar Rp. 8.010.000,- atau sebesar 74,79 %
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator kinerjanya adalah Jumlah rapat Komisi III dengan capaian kinerja 58,33% (target 60 kali = realisasi 105 kali, hal ini disebabkan kurangnya agenda rapat yang dijadwalkan komisi)

dengan anggaran sebesar Rp. 10.710.000,- terserap sebesar Rp. 8.210.000,- atau sebesar 76,66 %

- Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Indikator kinerjanya adalah Jumlah rapat pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI dengan capaian kinerja 100% (target 1 kali = realisasi 1 kali) dengan anggaran sebesar Rp. 2.955.000,- terserap sebesar Rp. 2.955.000,-
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah
 Indikator kinerjanya adalah Jumlah rapat Pansus LKPJ yang dilaksanakan dengan capaian kinerja 100% (target 6 kali = 6 kali) dengan anggaran sebesar Rp. 9.485.250,- terserap sebesar Rp. 9.485.250,- atau sebesar 100 %

d) Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator Kinerjanya adalah Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas. Untuk kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan sebagai berikut :

❖ Bimbingan Teknis DPRD

Indikator kinerjanya adalah Jumlah kegiatan bimbingan teknis
DPRD dengan capaian kinerja 100 % (target 6 kegiatan = realisasi
6 kegiatan) dengan anggaran sebesar Rp. 3.265.943.000,- terserap
sebesar Rp. 2.529.020.546,- atau sebesar 77,44 %

Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu fasilitasi publikasi dan dokumentasi dewan dengan capaian kinerja 100 % (target 12 bulan = realisasi 12 bulan) dengan anggaran sebesar Rp. 264.770.000,- terserap sebesar Rp. 261.025.000,- atau sebesar 98,58 %

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Indikator kinerjanya adalah jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan dengan capaian kinerja 100% (target 7 orang = realisasi 7 orang) dengan anggaran sebesar Rp. 228.000.000,-terserap sebesar Rp. 228.000.000,- atau sebesar 100 %

Penyusunan Program Kerja DPRD

Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen program kerja DPRD dengan capaian kinerja 100% (target 1 dokumen = realisasi 1 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 6.475.321,-terserap sebesar Rp. 6.472.400,- atau sebesar 100 %

e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Indikator Kinerjanya adalah Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi. Untuk kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut:

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD dengan capaian kinerja 100 % (target 1 dokumen = realisasi 1 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 3.340.000,-terserap sebesar Rp. 3.340.000,-atau sebesar 100 %

Pelaksanaan Reses

Indikator kinerjanya adalah Jumlah kegiatan reses dengan capaian kinerja 100 % (target 3 kegiatan = realisasi 3 kegiatan) dengan anggaran sebesar Rp. 4.852.821.510,- terserap sebesar Rp. 4.814.740.820,- atau sebesar 99,22 %

f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Indikator kinerjanya adalah Persentase pelaksanaan kode etik. Untuk kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut :

Penyusunan Kode Etik DPRD
 Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen kode etik DPRD

yang dievaluasi dengan capaian kinerja 100 % (target 1 dokumen

= realisasi 1 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 5.644.623,terserap sebesar Rp. 5.644.623,- atau sebesar 100 %

Pengawasan kode etik DPRD

Indikator kinerjanya adalah Jumlah rapat badan kehormatan yang difasilitasi dengan capaian kinerja 100 % (target 12 kali = realisasi 12 kali) dengan anggaran sebesar Rp. 18.249.995,-terserap sebesar Rp. 2.248.050,- atau sebesar 12,32 %

g) Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator kinerjanya adalah Persentase tugas DPRD yang difasilitasi. Untuk kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut :

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator kinerjanya adalah Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.107.929.000,- terserap sebesar Rp. 2.028.060.434,- atau sebesar 65 %

Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD dengan capaian kinerja 100% (target 1 dokumen = realisasi 1 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 103.220.000,-terserap sebesar Rp. 102.525.000,- atau sebesar 99 %

Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah

Indikator kinerjanya adalah Jumlah rapat banmus yang difasilitasi dengan capaian kinerja 91.66% (target 12 kali = realisasi 11 kali, hal ini disebabkan di bulan Juni sebagian ASN sekretariat DPRD terkena covid, sehingga kegiatan dikantor ditiadakan) dengan anggaran sebesar Rp. 44.760.000,- terserap sebesar Rp. 44.696.200,- atau sebesar 100 %

Fasilitasi tugas pimpinan DPRD

Indikator kinerjanya adalah Jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD dengan capaian kinerja 10% (target 20 kegiatan = 2 kegiatan, hal ini disebabkan tidak adanya undangan bimtek untuk

fraksi) dengan anggaran sebesar Rp. 182.817.000,- terserap sebesar Rp. 59.251.300,- atau sebesar 32 %

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator kinerjanya adalah Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan. Meliputi kegiatan :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator kinerjanya adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan capaian kinerja 100% (target 2 dokumen = realisasi 2 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 1.999.693,- terserap sebesar Rp. 1.945.175,- atau sebesar 97 %
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator kinerjanya adalah Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun dengan capaian kinerja 100 % (target 4 dokumen = realisasi 4 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 2.757.720,- terserap sebesar Rp. 2.757.720,atau sebesar 100 %
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kinerjanya adalah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja 100% (target 3 dokumen = realisasi 3 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 2.999.993,terserap sebesar Rp. 2.620.400,- atau sebesar 87,35 %

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah. Untuk kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 5.176.078.693,- terserap sebesar Rp. 5.060.175.142,atau sebesar 97,76 %
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 65.600.000,- terserap sebesar Rp. 46.550.000,- atau sebesar 70,96 %
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 469.787.100,- terserap sebesar Rp. 448.114.500,- atau sebesar 95,39 %
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Indikator kinerjanya adalah Jumlah Laporan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dengan capaian kinerja 100 % (target 2 dokumen = realisasi 2 dokumen) dengan anggaran sebesar Rp. 1.378.915,- terserap sebesar Rp. 1.378.915,- atau sebesar 100 %

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Untuk kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut :

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator kinerjanya adalah Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan dengan capaian kinerja 100% (target 5 unit = realisasi 5 unit) dengan anggaran sebesar Rp. 36.051.750,terserap sebesar Rp. 33.201.600,-

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerjanya adalah Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya. Untuk kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Indikator kinerjanya adalah Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja 100 % (target 76 stel = realisasi 76 stel) dengan anggaran sebesar Rp. 47.200.000,terserap sebesar Rp. 47.200.000,- atau sebesar 100 %
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator kinerjanya adalah Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal di anggaran perubahan sub kegiatan ini anggarannya di tiadakan, hal ini disebabkan tidak ada undangan untuk kegiatan dan adanya refocusing anggaran

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerjanya adalah Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Untuk kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan sebagai berikut :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 73.820.831,- terserap sebesar Rp. 73.817.825,- atau sebesar 100 %

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator kinerjanya adalah jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 167.215.920,- terserap sebesar Rp. 167.034.100,- atau sebesar 99,89 %
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga dengan anggaran dengan capaian kinerja 100 % sebesar Rp. 76.848.718,- terserap sebesar Rp. 76.746.500,- atau sebesar 99,87 %
- Penyediaan bahan logistik kantor Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 1.074.826.667,- terserap sebesar Rp. 1.047.951.500,atau sebesar 97,50 %
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 138.543.130,- terserap sebesar Rp. 138.542.900,- atau sebesar 100 %
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 75.798.600,- terserap sebesar Rp. 74.670.000,- atau sebesar 98,51 %
- Fasilitasi kunjungan tamu Indikator kinerjanya adalah Jumlah tamu yang difasilitasi dengan capaian kinerja 100% (target 396 orang = realisasi 396 orang) dengan anggaran sebesar Rp. 62.744.000,- terserap sebesar Rp. 62.720.000,- atau sebesar 99,96 %

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 245.026.000,- terserap sebesar Rp. 205.835.250,- atau sebesar 84,01 %

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerjanya adalah Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Untuk kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan Mebel

Indikator kinerjanya adalah Jumlah unit pengadaan mebel dengan capaian kinerja 100 % (target 1 unit = realisasi 1 unit) dengan anggaran sebesar Rp. 27.899.500,- terserap sebesar Rp. 27.750.000,- atau sebesar 99,46 %

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Indikator kinerjanya adalah Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain nya dengan capaian kinerja 100% (target 48 unit = realisasi 48 unit) dengan anggaran sebesar Rp. 391.185.708,- terserap sebesar Rp. 356.700.800,- atau sebesar 91,18 %

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Untuk kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut :

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 496.498.984,- terserap sebesar Rp. 420.283.213,- atau sebesar 84,65 %

- Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 61.180.000,- terserap sebesar Rp. 51.660.000,- atau sebesar 84,44 %
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 1.728.220.800,- terserap sebesar Rp. 1.692.681.128,- atau sebesar 97,94 %

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerjanya adalah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara. Untuk kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator kinerjanya adalah Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dengan capaian kinerja 100 % (target 5 unit = realisasi 5 unit) dengan anggaran sebesar Rp. 193.750.000,- terserap sebesar Rp. 151.757.393,- atau sebesar 78,33 %
- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Indikator kinerjanya adalah Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan capaian kinerja 100 % (target 3 unit = realisasi 3 unit) dengan anggaran sebesar Rp. 73.672.000,- terserap sebesar Rp. 51.218.650,- atau sebesar 69,52 %

Pemeliharaan Mebel

Indikator kinerjanya adalah Jumlah mebel yang dipelihara dengan capaian kinerja 100% (target 30 unit = realisasi 30 unit) dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- terserap sebesar Rp. 29.974.000,- atau sebesar 99,91 %

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerjanya adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan capaian kinerja 99,16% (target 237 unit = realisasi 235 unit, hal ini disebabkan genset rumah jabatan dan printer mengalami rusak berat sehingga biaya pemeliharaan tidak digunakan) dengan anggaran sebesar Rp. 268.695.000,- terserap sebesar Rp. 261.886.800,- atau sebesar 97,47 %

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator kinerjanya adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan capaian kinerja 100% (target 2 unit = realisasi 2 unit) dengan anggaran sebesar Rp. 966.252.000,- terserap sebesar Rp. 940.943.000,- atau sebesar 97,38 %

i) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD. Untuk kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan DPRD dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp. 28.100.000.000,- terserap sebesar Rp. 27.517.619.702,- atau sebesar 97,93 %
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator kinerjanya adalah Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD dengan capaian kinerja 100 % (target 230 stel = realisasi

230 stel) dengan anggaran sebesar Rp. 193.200.000,- terserap sebesar Rp. 190.620.000,- atau sebesar 98,66 %

Pelaksanaan Medical Chek up Indikator kinerjanya adalah Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up dianggaran perubahan sub kegiatan ini ditiadakan, hal ini disebabkan adnaya refocusing anggaran

j) Layanan Administrasi DPRD

Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD. Untuk kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan sebagai berikut:

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator kinerjanya adalah Jangka waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD dengan capaian kinerja 100 % dengan anggaran sebesar Rp 441.123.541,- terserap sebesar Rp. 396.861.000,- atau sebesar 89,97 %

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Pontianak

	Urusan/ Bidang Urusan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Target Kinerja capaian program	Realisasi Target Kinerja Hasil		Realisasi Kinerja Pr egiatan Tahun 2021		Target program	Perkiraan Realisasi Renstra Perangkat I berjal	Daerah s/d tahun
Kode	Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	(Renstra Perangkat Daerah) tahun 2020-2024	Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Targe Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4
	UNSUR PENDUKU	NG URUSAN PEMERINT	AHAN							
	SEKRETARIAT D	PRD								
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	-							
	Gaji dan Tunjangan PNS		60 bulan	12 bulan			1 1		12 bulan	
	Gaji dan Tunjangan DPRD		60 bulan	12 bulan					12 bulan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jangka waktu penyediaan kebutuhan surat menyurat	5 tahun	I tahun					1 tahun	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	jangka waktu pembayaran tagihan telepon, listrik dan PDAM	60 bulan	12 bulan			Livi j		12 bulan	

Penyediaan Kebersihan Kantor	jangka waktu pemeliharaan kebersihan kantor	60 bulan	12 bulan		12 bulan	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	jangka waktu penyediaan ATK & OP	60 bulan	12 bulan	5-3/2	12 bulan	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	12 bulan		12 bulan	
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	jangka waktu penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5 tahun	1 tahun		1 tahun	12.5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 bulan	12 bulan		12 bulan	
Penyediaan Makanan dan Minuman	jangka waktu penyediaan makanan dan minuman	60 bulan	12 bulan		12 bulan	
Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	jangka waktu fasilitasi rapat-rapat konsultasi dan koordinasi anggota DPRD	5 tahun	1 tahun		1 tahun	
Penyediaan jasa Teknis Administrasi Perkantoran	jangka waktu penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran	60 bulan	12 bulan		12 bulan	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	jangka waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60 bulan	12 bulan		12 bulan	

Penyediaan kegiatan OlahRaga	jangka waktu penyediaan kegiatan olahraga	60 bulan	12 bulan		12 bulan	
Penyediaan Kebersihan Rumah Jabatan	jangka waktu penyediaan kebersihan rumah jabatan	60 bulan	12 bulan		12 bulan	
Penyediaan fasilitasi kegiatan- kegiatan kantor	jangka waktu penyediaan fasilitasi kegiatan- kegiatan kantor	5 tahun	1 tahun		1 tahun	
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Rumah Jabatan	jangka waktu penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan rumah jabatan	5 tahun	1 tahun		I tahun	
Penyediaan Jasa Pengamanan	jangka waktu penyediaan jasa pengamanan	60 bulan	12 bulan	63.15	12 bulan	
Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD	jangka waktu pelayanan kegiatan anggota DPRD	5 tahun	1 tahun		1 tahun	
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan perlengkapan kantor	persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik					
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 tahun	1 tahun		I tahun	
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	4 unit	4 unit		4 unit	

Pemeliha Rutin/ Bi Kendara: Operasio	rkala pemeliharaan n Dinas/ rutin/berkala kendaraan	60 bulan	12 bulan		12 bulan
Pemeliha Rutin/ Bi Perlengk Rumah J Dinas	rkala pemeliharaan apan rutin/berkala	5 tahun	I tahun		1 tahun
Pengada Perlengk Rumah J Dinas	apan perlengkapan rumah	5 tahun	1 tahun		1 tahun
Pemelih Rutin/ B Mebeleu	rkala pemeliharaan	5 tahun	5 tahun		5 tahun
Pemeliha rutin/ber peralatar perlengk gedung k	kala pemeliharaan dan rutin/berkala peralatan apan dan perlengkapan	60 bulan	12 bulan		12 bulan
Pemelihi rutin/ber rumah jabatan/I	kala pemeliharaan rutin/berkala rumah	5 tahun	1 tahun		1 tahun
Pengada Peralatai Perlengk Gedung	/ peralatan / perlengkapan apan gedung kantor	5 tahun	1 tahun		1 tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan	8				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	5 orang		5 orang	
Penyusunan Evaluasi dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen evaluasi jabatan	15 dokumen				
program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Nilai evaluasi Akip	-				
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	10 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja	20 dokuman	4 dokumen		4 dokumen	
Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas bagi pegawai sekretariat dan anggota DPRD	1575 stel	312 stel		312 stel	

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti						
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	10 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	
Program Peningkatan Pelayanan Prima	persentase peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat						
Penyusunan Laporan Survey kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah dokumen laporan Survey kepuasan Masyarakat (SKM)	10 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	
Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase pengelolaan data sesuai SOP						
penyusunan data dan profil OPD	Jumlah buku profil OPD yang dicetak	500 buku					
Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD	jangka waktu fasilitasi dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	60 bulan	12 bulan			12 bulan	
Penyusunan Buku Selayang Pandang	jumlah buku selayang pandang yang dicetak	750 buku	0.00				
Program pengembangan sistem informasi	Persentase pengelolaan informasi sesuai SOP						

pengelolaan website	jangka waktu pembayaran honor pengelola website	60 bulan	12 bulan		12 bulan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	persentase anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas				
Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	15 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan
Fasilitasi Pengkajian Perda	jumlah perda yang dikaji	10 perda	2 perda		2 perda
Kerjasama ADEKSI dan ASDEKSI	jangka waktu pembayaran iuran adeksi dan asdeksi	5 tahun	1 tahun		1 tahun
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jangka waktu pembiayaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	5 tahun	1 tahun		1 tahun
Sosialisasi Perda Inisiatif	Jumlah kegiatan sosialisasi perda inisiatif yang dilaksanakan	60 bulan			
Fasilitasi rapat- rapat DPRD	jumlah rapat yang dilaksanakan sesuai jadwal	60 bulan	12 bulan		12 bulan

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Pontianak

				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Ca Pro (Re	t Kinerja ipaian ogram enstra	Realisasi Target Kinerja Hasil	Ti			erja Program un 2021	dan	da (Ren	get program n kegiatan ja perangkat h tahun 2022)	Tar	raan Realisa get Renstra I rah s/d tahui	Perangkat
	Kode		Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program (Outcome) dan Kegiatan (Output), sub kegiatan	Daera	angkat ah) tahun 1-2024	Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Perar	rget Renja gkat Daerah ahun 2021	Pera	disasi Renja ngkat Daerah ahun 2021	Ting kat Real isasi (%)			Pro Keg tahu	ealisasi apaian gram dan giatan s/d n berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)			-14	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)=(5+7+9)	(11)=(10/ 4)
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	02			SEKRETARIAT DPRD								-						
4	02	01		PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100	%		100	%	100	%	100	100	%	200	%	200,00%
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	36	dokumen		9	dokumen	9	dokumen	100	9	dokumen	18	dokumen	50%

4	02	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	dokumen	4	dokumen	50%
4	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	16	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100	4	dokumen	8	dokumen	50%
4	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	3	dokumen	6	dokumen	50%
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50%
4	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50%
4	02	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50%
4	02	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50%

4	02	01	2.02	0.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	8	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	dokumen	4	dokumen	50%
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	5	unit	5	unit	5	unit	100	5	unit	10	unit	200%
4	02	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang diasuransikan	5	unit	5	unit	5	unit	100	5	unit	10	unit	200%
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	140	orang	35	orang	35	orang	100	35	orang	70	orang	50,00%
4	02	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	296	stel	76	stel	85	stel	112	78	stel	163	stel	55,07%
4	02	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal	20	orang						7	orang	7	stel	35,00%

4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%

4	02	01	2.06	08		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	3.58 4	orang	3.0	0	orang	896	orang	30	940	orang	1.83	orang	51,23%
4	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	48	bulan	12		bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	156	unit	49		unit	49	unit	100	133	unit	182	unit	116,67%
4	02	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	48	unit	1		unit	1	unit	100	40	unit	41	unit	85,42%
4	02	01	2.07	11		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	108	unit	48		unit	48	unit	100	93	unit	141	unit	130,56%
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	48	bulan	12		bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%

4	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.08	03		Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa perelatan dan perlengkapan kantor	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	601	unit	277	unit	275	unit	99	295	unit	570	unit	94,84%
4	02	01	2.09	01		Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5	unit	5	unit	5	unit	100	5	unit	10	unit	200,00%
4	02	01	2.09	02		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3	unit	3	unit	3	unit	100	3	unit	6	unit	200,00%

4	02	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	354	unit	30	unit	30	unit	100	48	unit	78	unit	22,03%
4	02	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	237	unit	237	unit	235	unit	99	237	unit	472	unit	199,16%
4	02	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	2	unit	2	unit	2	unit	100	2	unit	4	unit	200,00%
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jangka waktu penyediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan DPRD	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.15	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	900	stel	225	stel	227	stel	101	270	unit	497	unit	55,22%
4	02	01	2.15	03		Pelaksanaan Medical Chek up	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti medical check up	45	orang						45	unit	45	unit	100,00%

4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD		Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	01	2.16	04		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jangka waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	02			PROGRAM DUKUNGA N PELAKSAN AAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	%	100	%	108	%	108	100	%	208	%	208,00%
							Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	%	100	%	68,4	%	68	100	%	168	%	168,40%
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100	%	100	%	156	%	156	100	%	256	%	256,00%
4	02	02	2.01	01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen program pembentukan peraturan daerah	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%

02	02	2.01	02		Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah rancangan perda yang dibahas	40	raperda	10	raperda	20	raperda	200	10	raperda	30	raperda	75,00%
02	02	2.01	03		Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah rancangan perda yang dikaji	20	raperda	3	raperda	3	raperda	100	5	raperda	8	raperda	40,00%
02	02	2.01	04		Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterang an dan /atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik yang disusun	8	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	2	dokumen	5	dokumen	62,50%
02	02	2.01	05		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumfah dokumen tata tertib DPRD yang dievaluasi	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%
02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah dokumen kebijakan anggaran	20	dokumen	5	dokumen	5	dokumen	100	5	dokumen	10	dokumen	50,00%
02	02	2.02	01		pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	4	dokumen	ī	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%
02	02	2.02	02		pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahanPPAS	4	dokumen	I	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%
02	02	2.02	03		Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%
02	02	2.02	04		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen APBD Perubahan	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%
02	02	2.02	06		Pembahasan Pertanggungjawaba n APBD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%
	02 02 02 02 02 02	02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 0	02 02 2.01 02 02 2.01 02 02 2.01 02 02 2.01 02 02 2.02 02 02 2.02 02 02 2.02 02 02 2.02 02 02 2.02 02 02 2.02 02 02 2.02	02 02 2.01 03 02 02 2.01 04 02 02 2.01 04 02 02 2.01 05 02 02 2.02 01 02 02 2.02 01 02 02 2.02 02 02 02 2.02 03 02 02 2.02 04	02 02 2.01 03 02 02 2.01 04 02 02 2.01 05 02 02 2.01 05 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 02 02 2.02 01 02 02 2.02 02 02 02 2.02 02 02 02 2.02 03 02 02 2.02 04	02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 02 02 2.01 04 Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterang an dan /atau Naskah Akademik 02 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 02 02 2.02 01 pembahasan KUA dan PPAS 02 02 2.02 02 pembahasan APBD 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD Perubahan 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaba	Rancangan Peraturan daerah Rancangan Peraturan daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Dumlah rancangan perda yang dibahas Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Dumlah naskah akademik yang disusun Penyusunan Tata Tertib DPRD Dyang dievaluasi Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan KUA dan PPAS Dembahasan KUA dan perubahan KUA dan perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Jumlah dokumen APBD Perubahan Jumlah dokumen Pertanggungjawaban Jumlah dokumen APBD Perubahan Jumlah dokumen APBD Perubahan Jumlah dokumen APBD Perubahan	Rancangan Peraturan daerah Peraturan deraturan peratuanan peratuan p	Rancangan Peraturan daerah Pagn daerah Peraturan dera pundahasan Peraturan dera punda dakumen Peranggungjawaban Pagn daera punda dakumen Peranggungjawaban Pagn daera pundahasan Pagn daera	Rancangan	Rancangan Peraturan daerah Para Peraturan daerah Peraturan peraturan daerah Peraturan peraturan daerah Peraturan Pera	Rancangan Peraturan daerah Penyelenggaraan Kagian Perundang-Undangan Jumlah rancangan Peraturan daerah Jumlah naskah Rademik Yang disusun Sakah Akademik Yang Penyelelasan/keterang Adam / Akademik Penyelelasan Penyelasan Penyelasan	Rancangan Peraturan danerah danerah Peraturan danerah Peraturan danerah danerah Peraturan danerah danerah Peraturan danerah Peraturan dane	Rancangan Pernyelengarana Pernyelengarana Penyelengarana Penyele	Rancangan Peraturan daerah Peraturan daerah	Rancangan	Rancangan Perdaty and glibahas 40 raperda 10 raperda 20 raperda 20 10 raperda 30	Rancangan

4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintahan		Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100	%	100	%	100	%	100	100	%	200	%	200,00%
4	02	02	2.03	01		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat komisi I	240	kali	60	kali	112	kali	187	60	kali	172	kali	71,67%
4	02	02	2.03	02		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat komisi II	240	kali	60	kali	52	kali	87	60	kali	112	kali	46,67%
4	02	02	2.03	03		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat komisi IV	240	kali	60	kali	35	kali	58	60	kali	95	kali	39,58%
4	02	02	2.03	04		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Komisi III	240	kali	60	kali	105	kali	175	60	kali	165	kali	68,75%
4	02	02	2.03	06		Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	Jumlah rapat pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI	4	kali	Ī	kali	1	kali	100	1	kali	2	kali	50,00%
4	02	02	2.03	08		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n Kepala daerah	Jumlah rapat Pansus LKPJ yang dilaksanakan	80	kali	6	kali	6	kali	100	10	kali	16	kali	20,00%

4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	100	%	100	%	100	%	100	100	%	200	%	200,00%
4	02	02	2.04	02		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah kegiatan bimbingan teknis DPRD	24	kegiatam	6	kegiatan	6	kegiatan	100	6	kegiatan	12	kegiatan	50,00%
4	02	02	2.04			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jangka waktu fasilitasi publikasi dan dokumentasi dewan	48	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	24	bulan	50,00%
4	02	02	2.04			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	7	orang	7	orang	7	orang	100	7	orang	14	orang	200,00%
4	02	02	2.04			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen program kerja DPRD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpuna n Aspirasi Masyarakat		Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100	%	100	%	100	%	100	100	%	200	%	200,00%
4	02	02	2.05	02		Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%
4	02	02	2.05	03		Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses	12	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	100	3	kegiatan	6	kegiatan	50,00%
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase pelaksanaan kode etik	100	%	100	%	100	9/6	100	100	%	200	%	200,00%

4	02	02	2.06	01		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD yang dievaluasi	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%
4	02	02	2.06	02		Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah rapat badan kehormatan yang difasilitasi	48	kali	12	kali	12	kali	100	6	kali	18	kali	37,50%
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100	%	100	%	57,8 0	%	57,8 0	100	%	158	%	157,80%
4	02	02	2.08	01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi	48	kegiatan	12	kegiatan	12	kegiatan	100	12	kegiatan	24	kegiatan	50,00%
4	02	02	2.08	02		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja DPRD	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	2	dokumen	50,00%
4	02	02	2.08	03		Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah rapat banmus yang difasilitasi	48	kali	12	kali	11	kali	92	12	kali	23	kali	47,92%
4	02	02	2.08	04		Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD	80	kegiatan	20	kegiatan	2	kegiatan	10	20	kegiatan	22	kegiatan	27,50%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dengan tugas pokoknya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD tidaklah berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Tidak ada standar pelayanan minimal tertentu yang wajib dipenuhi oleh Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Meskipun demikian, Sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD; artinya bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD.

Adapun fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari :

- Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD yang meliputi umum dan aparatur, rumah tangga dan perlengkapan serta humas dan protokol dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD
- Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD yang meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD yang meliputi seluruh rapat DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

4) Pengadaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Dalam rangka meningkatkan efektifitas DPRD maka Sekretariat DPRD harus dapat berperan secara maksimal, dan untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pontianak

No	Indik	SPM/ standar	IK	Target	Renstra I	Perangkat	Daerah		lisasi aian	Proy	veksi	Catatan
NO	ator	nasional	K	Tahun 2021	Tahu n 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		M	H									

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD.

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan Peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan penyajian informasi.
 - d) Kualitas tenaga ahli dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan tahunan ke depan Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dengan menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

A. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

- 1. Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain:
 - a) Ketersediaan anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan bagi organisasi untuk terus berinovasi dalam

- penyusunan program dan kegiatan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- b) Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM.
- c) Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka menunjang kinerja DPRD
- d) Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuka peluang pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- e) Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) sebagai wadah bertukar informasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.

2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain:

 a) Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi.

B. Identifikasi Faktor Strategi Internal

- 1. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain:
 - a) Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
 - b) Ketersediaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang cukup memadai.

2. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan pun dirasa belum optimal
- b) Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan professional, sehingga belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat kota Pontianak.

- c) Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- d) Tingginya intensitas kegiatan DPRD yang menyebabkan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang,tantangan/ancaman diperoleh strategi alternative sebagai berikut :

- 1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- Strategi menanggulangi kendala / kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
- 3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan /ancaman;
- 4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan tidak mengalami perubahan dikarenakan dalam penyusunan sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Pontianak guna mendukung target dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Pontianak

			Rancangan Awal F	RKPD					Hasil Analisis Kel	butuhan			
No	Program / Kegia	atan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatai	n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)		(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)			(8)=(7/6)	(9)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		42.314.664.666	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA			Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan		42.314.664.666	
.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		29.153.280	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		29.153.280	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.080.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.080.000	

1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	11.473.280		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	11.473.280
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	15,600.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	15.600.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		7.323.843.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		7.323.843.800
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	6.672.640.000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	6.672.640.000
1.2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	59,488,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	59,488.000

1.2.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	12 bulan	583.110.840		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	12 bulan	583.110.840
1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	2 dokumen	8.604.960		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	2 dokumen	8.604.960
Ba Da Pe	dministrasi arang Milik baerah pada erangkat baerah			Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		58.240.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		58.240.000
1.3,1		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 unit	58.240.000		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 unit	58.240.000

1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		183.352.832	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya		183.352.832
1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 stel	47.840.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 stel	47.840.000
1.4.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	135.512.832		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	135.512.832
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.795.564.264	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.795.564.264
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	77.376.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	77.376.000

1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	158.849.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	158.849.600	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	194.064.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	194.064.000	
1.5.4	Penyediaan bahan logistik kantor	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	725.244.000	Penyediaan bahan logistik kantor	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	725.244.000	
1.5.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	109.553.496	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	109.553.496	
1.5.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 bulan	78.830.544	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 bulan	78.830.544	

1.5.8		Fasilitasi kunjungan tamu	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000 orang	156.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000 orang	156.000,000
1.5.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	295.646.624		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	295.646.624
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		621.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		621.400.000
1.6.1	Dacial	Pengadaan Mebel	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	51.313.600		Pengadaan Mebel	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	51.313.600
1.6.2		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 unit	570.086.400		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 unit	570.086.400

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		2.842.163.792	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		2.842.163.792
7.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	620.360.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	620.360.000
.7.2		Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	186.056.000		Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	186.056.000
7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	2.035.747.792		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	2.035.747.792
.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		1.179.715.680	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		1.179.715.680

Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	193.450.400	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	193.450.400
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	73.207.680	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	73.207.680
Pemeliharaan Mebel	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	354 unit	26.000.000	Pemeliharaan Mebel	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	354 unit	26.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 unit	341.120.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	237 unit	341.120.000
Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	2 unit	545.937.600	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	2 unit	545.937.600
	pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan	pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kabupaten/Kota,s emua kabupaten/Kota,s emua kecamatan, Semua	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Recamatan, Semua kabupaten/Kota, semua Kecamatan, Semua Kecam	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Melurahan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Redurahan Kedurahan Semua kabupaten/Kota, semua kabupaten/Kota, semua kelurahan Kedurahan Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direha Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direha	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan prorangan Dinas atau Kendaraan prorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitas semua Kedurahan Perizinanya yang Dipelihara Sa unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara 237 unit 341.120.000 341.120.000 341.120.000 341.120.000	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Mabupaten/Kota,s emua Kelurahan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya Semua Kedurahan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya Semua Kedurahan Semua Kedurahan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya Semua Kedurahan Semua Semua Kedurahan Semua Kedurahan Semua Semua Kedurahan Semua Semua Kedurahan Semua Kedurahan Semua S	Pemeliharan An Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan jasa Pemeliharan, Biaya Redurahan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Pemeliharaan Apalik Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kecamatan, Semua Kelurahan Pemeliharaan Mebel Semua Relurahan Pemeliharaan Mebel Semua Relurahan Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Semua Kelurahan Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Pemeliharaan, Pemeliharaan	Pemeliharan dan pajak Kendaran perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan Dinas Di

1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Jangka waktu penyediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		27.820.095.018	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			Jangka waktu penyediaan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		27.820.095.018
1.9.1		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 bulan	27.501.179.018		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 bulan	27.501.179,018
1,9.2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	225 stel	196.560.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	225 stel	196.560.000
1.9.3		Pelaksanaan Medical Chek up	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	122.356.000		Pelaksanaan Medical Chek up	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	122.356.000
1.10	Layanan Administrasi DPRD			Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD		461.136.000	Layanan Administrasi DPRD			Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD		461.136.000

1.10.1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 bulan	461.136.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 bulan	461.136.000	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANA AN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		15.469.165,334	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAA N TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		15.469.165.334	
				Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD						Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi		533.270.296	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	G.	533.270.296	
2.1.1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	2.324.400		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	2.324.400	

2.1.2		Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 raperda	11.449.360		Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 raperda	11.449.360
2.1.3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	5 raperda	168.186,720		Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	5 raperda	168.186.720
2.1.4		Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan /atau Naskah Akademik	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 dokumen	347.441.120		Fasilitasi penyusunan penjelasan/ketera ngan dan /atau Naskah Akademik	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 dokumen	347.441.120
2.1.5		Penyusunan Tata Tertib DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	3.868.696		Penyusunan Tata Tertib DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	3.868.696
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran			Jumlah dokumen kebijakan anggaran		18.168.800	Pembahasan Kebijakan Anggaran			Jumlah dokumen kebijakan anggaran		18.168.800

pembahasan KUA dan PPAS	kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	3.473.600	pembahasan KUA dan PPAS	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	3.473.600
pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	3.473.600	pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	I dokumen	3.473.600
Pembahasan APBD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	4.274.400	Pembahasan APBD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	4.274.400
Pembahasan APBD Perubahan	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	3.473.600	Pembahasan APBD Perubahan	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	3.473.600
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	l dokumen	3.473.600	Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	1 dokumen	3.473.600
	Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan	PPAS kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pembahasan Semua Kelurahan Pembahasan Semua Kelurahan Pembahasan Semua Kelurahan	Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Perubahasan Perubahan Perubahasan Pe	Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pertanggungjawaban APBD Pembahasan APBD Perubahan Pertanggungjawaban APBD Pembahasan APBD Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban APBD Pembahasan APBD Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Perubahan Redurahan Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pertanggungjawaban APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban Pert	PPAS kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PPAS Semua Kelurahan Semua Kelurahan Semua Kelurahan PPAS Semua Kelurahan PPAS Semua Kelurahan PPAS Semua Kelurahan PPAS Semua Kelurahan Semua Kelurahan Semua Kelurahan Semua Kelurahan PPAS Semua Kelurahan Semua Kelurahan Semua Kelurahan Semua Kelurahan Semua Kelurahan PPAS Semua Kelurahan Semua Kelura	PPAS	PPAS Kabupaten/Kota,s emua Keurahan KUA dan PPAS Kuamatan, Semua Keurahan KUA dan PPAS Kuamatan, Semua Keurahan Kuamatan, Semua Keurahan Kuamatan, Semua Keurahan Lasil Pembahasan La	PPAS Rabupaten/Kota_s emua Hasil Pembahasan kUA dan PPAS Rabupaten/Kota_s emua Kecamatan, Semua Kelurahan Semu

2.3	Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan			Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi		57.517.200	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi		57.517.200
2.3.1		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 kali	11.138.400		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60 kali	11.138.400
2.3.2		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 kali	11.138.400		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60 kali	11.138.400
2.3.3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 kali	11.138.400		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	60 kali	11.138.400
2.3.4		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 kali	11.138.400		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60 kali	11.138.400
2.3.5		Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	1 kali	3.073.200		Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 kali	3.073.200

				Keuangan									
2.3.6		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah	20 kali	9.890.400		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala daerah	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	20 kali	9.890.400	
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD			Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas		3.546.790.000	Peningkatan Kapasitas DPRD			Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas		3.546.790.000	
2.4.1		Bimbingan Teknis DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 kegiatan	2.750.628.400		Bimbingan Teknis DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 kegiatan	2.750.628.400	
2.4.2		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 bulan	483.600.000		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 bulan	483.600.000	

2.4.3		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	305.760,000		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	305.760,000
2.4.4		Penyusunan Program Kerja DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 bulan	6.801.600		Penyusunan Program Kerja DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 bulan	6.801.600
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi		4.271.800.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi		4.271.800.000
.5.1		Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	3,473.600		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	3.473.600
.5.2		Pelaksanaan Reses	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 kali	4.268.326.400		Pelaksanaan Reses	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 kali	4.268.326.400

2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			Persentase pelaksanaan kode etik		37.408.696	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			Persentase pelaksanaan kode etik		37.408.696
2.6.1		Penyusunan Kode Etik DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dokumen	3.868.696		Penyusunan Kode Etik DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dokumen	3.868.696
2.6.2		Pengawasan kode etik DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 kali	33.540.000		Pengawasan kode etik DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 kali	33.540,000
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD			Persentase tugas DPRD yang difasilitasi		7.004.210.342	Fasilitasi Tugas DPRD			Persentase tugas DPRD yang difasilitasi		7.004.210.342
2.7.1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 kegiatan	5.412.066.400		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 kegiatan	5.412.066.400
2.7.2		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 dokumen	135.220.800		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 dokumen	135.220.800

2.7.3	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 kali	46.550.400	Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 kali	46.550.400
2.7.4	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	semua kabupaten/Kota,s emua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 kegiatan	1.410.372.742	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	semua kabupaten/Kota,se mua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 kegiatan	1.410.372.742

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD dituntut untuk mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Melalui pelaksanaan trifungsi DPRD (Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan), diharapkan mampu mengawal jalannya roda pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan demi mewujudkan visi dan misi Walikota yang telah ditetapkan.

Setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD nantinya akan diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran, sedangkan penyelenggaraan progam dan kegiatan masyarakat akan ditampung, direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rencana Kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD. Pada forum Perangkat Daerah tidak terdapat usulan program/ kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat DPRD, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah. Hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD bukanlah perangkat daerah teknis, melainkan hanya sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan yang hanya menyelenggarakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Pontianak

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	MILII	_			
	-1-V-1-1-1-1-1-				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3. 1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan aspek pelayanan umum pada bidang pelayanan unsur pendukung urusan pemerintahan, Sekretariat DPRD ikut mendukung terlaksananya misi 3 RPJMD Kota Pontianak yaitu: "Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas bersih dan cerdas".

Jika dikaitkan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut SDGs (Sustainable Development Goals) yang terdiri dari 17 tujuan global, 94 Sasaran Global dan 230 Sasaran Nasional, maka sekretariat DPRD terkait dengan :

- a. Tujuan global XVI yaitu : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
 - Sasaran global XVI.5 yaitu : Mengembangkan Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat
 - c. Sasaran nasional XVI.5.5 yaitu : Meningkatnya persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian 100%, Lembaga 100%, Provinsi 100%, Kabupaten/ Kota 80% pada Tahun 2019

Namun jika dikaitkan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 10 tema pembangunan, maka sekretariat DPRD terkait dengan tema 8 yaitu "Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik". Sebagaimana Tujuan Sekretariat DPRD Yaitu "Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat", serta sasaran yang lebih spesifik yaitu " Meningkatkan kualitas layanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD".

Dengan tersedianya layanan yag berkualitas diharapkan Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai lembaga Legislatif secara maksimal serta bersinergi dengan Pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu kepada visi sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai penjabaran dari setiap misi, dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 maka perlu ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk satu tahun.

Adapun tujuan Renja Sekretariat DPRD tahun 2023 adalah:

Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat

Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan utama yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan target dan sasaran yang jelas. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk satu tahun kedepan meliputi program, kegiatan, yang akan dilaksanakan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Renstra Sekretariat DPRD dan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan berisi program, kegiatan, lokasi, hasil program dan target, masukan kegiatan dan target, keluaran kegiatan dan target, hasil kegiatan dan target, serta pagu indikatif tahun anggaran 2023, sebagai cara untuk melaksanakan dan mengukur capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Dengan danya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kebijakan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak diselaraskan dengan perkembangan Kota Pontianak secara umum. Sedangkan kinerja yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan terhadap pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) merupakan prioritas kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023

Unit Organisasi: 4.02.0.00.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

	Kode		Urusan/ Bidang								Reno	ana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
				Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Capaian Program	Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Target Capaian	Kinerja	Kebutuhan Dana/		
					Kegiatan	Cupular i rogram	Kegiatan		Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	(Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
4						UNSUR PENDUKI	UNG URUSAN PEMI	ERINTAHAN		***************************************	-		1		- University of the second				(
4	2					SEKRETARIAT D	PRD							55,601,920,000					60,645,563,000
4	2	1				PROGRAM PENU	NJANG URUSAN PE	EMERINTAHAN D	AERAH KABUPAT	EN/KOTA				40,928,619,700					45,330,548,606
4	02	001	0	2.01		Perencanaan, Peng	ganggaran, dan Evali	uasi Kinerja Peran	gkat Daerah					13,756,500					30,610,944
4	2	1	0.	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	2 Dokumen	100 %	1,999,100	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	2,184,000
4	2	1	02	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	4 Laporan	100 %	8,757,900	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	12,046,944

4	2	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3 Laporan	100 %	2,999,500	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	16,380,000
4	02	001	02.02	-	Administrasi Keua	angan Perangkat Dae	erah	r				5,365,418,600				7,853,429,590
4	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian	Jumlah Orang yang Menerima	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi	100 %	37			PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian		
	2		020,020		ASN	terhadap pelayanan kesekretariatan	Gaji dan Tunjangan ASN	keuangan perangkat daerah	100 %	orang/ Bulan	12 bulan	4,878,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	7,172,640,000
4	2	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	12 Dokumen	12 bulan	55,600,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	59,488,000
4	2	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	12 Bulan	12 bulan	430,340,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	612,266,382
4	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2 Dokumen	12 bulan	1,378,600	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	9,035,208

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2023

4	02	001	02.03		Administrasi Bara	ang Milik Daerah pad	la Perangkat Daera	ıh				35,792,000				61,152,000
4	2	1	02.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah	100 %	1 dokumen	1 Dokumen	35,792,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	61,152,000
4	02	001	02.05		Administrasi Kepe	egawaian Perangkat	Daerah					158,972,000				210,744.83
4	2	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianny a	100 %	3 Paket	37 Orang	48,400,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	50,232,000
4	2	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianny a	100 %	7 Orang	37 Orang	110,572,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	160,512,831
4	02	001	02.06		Administrasi Umu	m Perangkat Daerah						1,957,728,385				2,312,173,767
4	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi umum perangkat daerah	100 %	12 Paket	12 Bulan	70,546,185	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	81,244,800
4	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi umum perangkat daerah	100 %	12 Paket	12 Bulan	200,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretarjatan	100 %	166,792,080
4	2	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi umum perangkat daerah	100 %	12 Paket	12 Bulan	92,357,740	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	203,767,200

-				7												
4	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi umum perangkat daerah	100 %	12 Paket	12 Bulan	999,432,960	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	1,049,044,000
4	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi umum perangkat daerah	100 %	12 Paket	12 Bulan	168,897,500	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	219,106,992
4	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi umum perangkat daerah	100 %	8 Dokumen	12 Bulan	76,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	82,772,071
4	2	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi umum perangkat daerah	100 %	47 Laporan	12 Bulan	100,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	163,800,000
4	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu penyelenggaraa n administrasi umum perangkat daerah	100 %	12 Laporan	12 Bulan	250,494,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	345,646,624
4	02	001	02.07		Pengadaan Barang	g Milik Daerah Penui	njang Urusan Pem	erintah Daerah				607,986,210				652,470,000
4	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	40 Unit	120 Unit	164,423,610	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	53,879,280

4	2	1	02.07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	93 Unit	120 Unit	443,562,600	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	598,590,720
4	02	001	02.08		Penyediaan Jasa P	enunjang Urusan Pe	merintahan Daera	h				2,48,537,284				3,666,978,192
4	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	12 Laporan	12 Bulan	466,498,984	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	645,174,400
4	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	12 Laporan	12 Bulan	296,687,500	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretarjatan	100 %	286,056,000
4	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	12 Laporan	12 Bulan	1,726,350,800	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan	100 %	2,735,747,792
4	02	001	02.09		Pemeliharaan Bar	ang Milik Daerah Pe	nunjang Urusan Pe	emerintahan Daerah				812,426,866				1,238,701,464
4	2	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	5 Unit	277 Unit	155,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	203,122,920

4	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	3 Unit	277 Unit	55,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	76,868,064
4	2	1	02.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	30 Unit	277 Unit	30,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	27,300,000
4	2	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	237 Unit	277 Unit	238,818,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	00 %	358,176,000
4	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	2 Unit	277 Unit	339,608,866	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	00 %	573,234,480
4	02	001	02.15		Layanan Keuanga	n dan Kesejahteraan	DPRD					28,947,120,000				28,820,095,018
4	2	1	02.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima layanan	100 %	45 Orang/Bulan	45 Orang	28,758,120,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	00 %	28,401,179,018
4	2	1	02.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Anggota DPRD yang menerima layanan	100 %	3 Paket	45 Orang	189,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	00 %	296,560,000

4	2	Î	02.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima layanan	100 %	45 Orang	45 Orang		Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	122,356,000
4	02	001	02.16		Layanan Adminis	strasi DPRD	1					539,881,855				484,192,800
4	2	1	02.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jangka waktu penyediaan layanan administrasi DPRD	100 %	12 Paket	12 Bulan	539,881,855	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	484,192,800
4	2	2			PROGRAM DUK	UNGAN PELAKSAN	AAN TUGAS DAN	FUNGSI DPRD				14,673,300,300				15,315,014,394
4	02	002	02.01		Pembentukan Per	aturan Daerah dan P	eraturan DPRD					508,655,800				559,933,811
4	2	2	02.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	1 Dokumen	100 %	2,393,900	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	2,440,620
4	2	2	02.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	10 Dokumen	100 %	135,379,300	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	12,021,828
4	2	2	02.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	5 Dokumen	100 %	81,080,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	176,596,056

4	2	2	02.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ketera ngan dan/atau Naskah Akademik	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	2 Dokumen	100 %	285,815,200		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	364,813,176
4	2	2	02.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Persentase peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	1 Dokumen	100 %	3,987,400	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	4,062,131
4	02	002	02.02		Pembahasan Kebi	jakan Anggaran						98,225,000				19,077,240
4	2	2	02.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	3,325,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	3,647,280
4	2	2	02.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	3,325,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	3,647,280
4	2	2	02.02	3	Pembahasan APBD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	84,925,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	4,488,120
4	2	2	02.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	3,325,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	3,647,280
4	2	2	02.02	6	Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjaw aban APBD	Jumlah dokumen kebijakan anggaran	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	3,325,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	3,647,280

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2023

4	02	002	02.0	3	Pengawasan Penye	elenggaraan Pemerin	tahan					47,504,000				60,393,060
4	2	2	02.0	3 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %	60 Laporan	100 %	8,680,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	11,695,320
4	2	2	02.0	3 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %	60 Laporan	100 %	6,860,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	11,695,320
4	2	2	02.03	3 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %	60 Laporan	100 %	8,680,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	11,695,320
4	2	2	02.0.	3 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %	60 Laporan	100 %	8,680,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	11,695,320
4	2	2	02.00	3 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %	1 Dokumen	100 %	3,325,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	3,226,860

4	2	2	02.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjaw aban Kepala Daerah	Persentase rapat pengawasan yang difasilitasi	100 %	20 Dokumen	100 %	9,459,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	10,384,920
4	02	002	02.04		Peningkatan Kapa	asitas DPRD						2,739,543,400				4,086,598,080
4	2	2	02.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan	100 %	6 Dokumen	100 %	1,909,945,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	3,250,628,400
4	2	2.	02.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan	100 %	12 Dokumen	100 %	454,877,400	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	507,780,000
4	2	2	02.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan	100 %	7 Orang	100 %	294,000,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	321,048,000

4	2	2	02.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan	100 %	1 Dokumen	100 %	80,721,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	7,141,680
4	02	002	02.05		Penyerapan dan P	enghimpunan Aspira	si Masyarakat					6,262,428,000				2,863,425,968
4	2	2	02.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100 %	1 Dokumen	100 %	3,325,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	3,647,280
4	2	2	02.05	3	Pelaksanaan Reses	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Persentase aspirasi masyarakat yang difasilitasi	100 %	3 Dokumen	100 %	6,259,103,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	2,859,778,688
4	02	002	02.06		Pelaksanaan dan I	Pengawasan Kode Eti	k DPRD					14,129,600				39,279,131
4	2	2	02.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Persentase pelaksanaan kode etik	100 %	I Dokumen	100 %	3,796,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	4,062,131

4	2	2	02.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan kode etik	100 %	12 Laporan	100 %	10,333,600	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	35,217,000
4	02	002	02.08		Fasilitasi Tugas D	PRD						5,002,814,500				7,686,307,104
4	2	2	02.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	12 Kegiatan	100 %	4,050,517,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	5,912,066,400
4	2	2	02.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	1 Dokumen	100 %	120,262,500	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	141,981,840
4	2	2	02.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	12 Kali	100 %	22,050,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	48,877,920

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2023

4 2	2	02.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	20 kegiatan	100 %	809,985,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase fasilitasi kehumasan, protokoler, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	1,583,380,944
LOIME	-										55,601,920,000				60,645,563,000

BAB V PENUTUP

Rencana kerja ini dimaksudkan sebagai penggambaran proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari seluruh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 secara umum. Dokumen ini memuat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

Demikian Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai visi dan misi daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Pontianak, Juli 2022 Sekretaris DPRD Kota Pontianak

Hj. TITIN SUBAKTI, S.Sos.,M.Si